



Jateng
gayeng

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2020. LKjIP SKPD Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran. Proses kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

**Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah**



**Ir. Suryo Banendro,MP
NIP. 19610408 198903 1006**

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

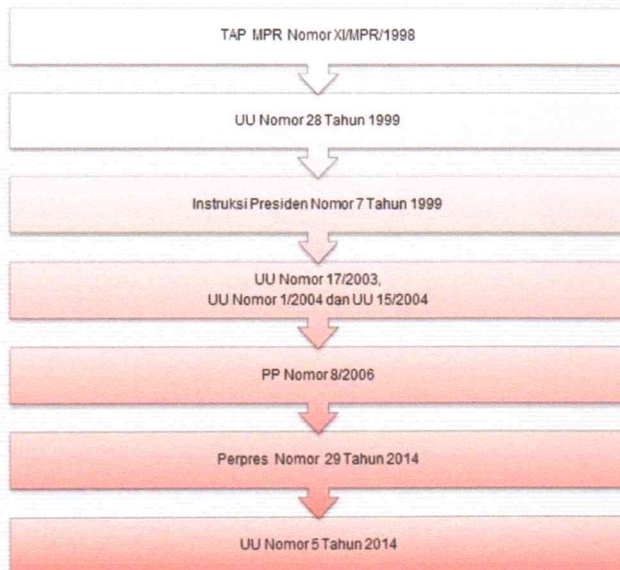
Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dan meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian.” Misi ini bertujuan mewujudkan desa mandiri/berdikari melalui kedaulatan pangan dan energi. Hal ini sejalan dengan salah satu Nawa Cita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menggerakkan sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara akuntabel, dengan mengukur hasil-hasilnya baik secara fisik maupun finansial. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Sistem AKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2015). Berdasarkan Inpres No: 7/1999, instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas perencanaan yang telah ditetapkan. Inpres ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi, Kebijakan/Program dan indikator kinerja), mengukur keberhasilan organisasinya melalui seperangkat indikator kinerja yang

ditetapkannya sendiri, dan melaporkan akuntabilitas kinerjanya. Dasar hukum tertera pada gambar 1.

Mandat Berakuntabilitas Kinerja



- ☐ Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu **asas umum dalam penyelenggaraan negara**.
- ☐ UU Nomor 17/2003 menegaskan bahwa salah satu asas **best practices** dalam pengelolaan keuangan negara adalah **akuntabilitas berorientasi pada hasil** atau dengan kata lain manajemen pemerintahan kita telah memasuki era **performance-based management**.
- ☐ UU Nomor 1/2004 dan UU Nomor 15/2014 menyatakan bahwa salah asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.
- ☐ **PP 8 /2006**. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu **sistem akuntabilitas kinerja** instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- ☐ **Perpres Nomor 29/2014** penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
- ☐ UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa **kinerja instansi pemerintah** menjadi dasar dari pengukuran kinerja individu. (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi

Gambar 1. Dasar Hukum Sistem AKIP

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

b.1 Kedudukan

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah merupakan dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 yaitu tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

b.2 Tugas Pokok dan Fungsi

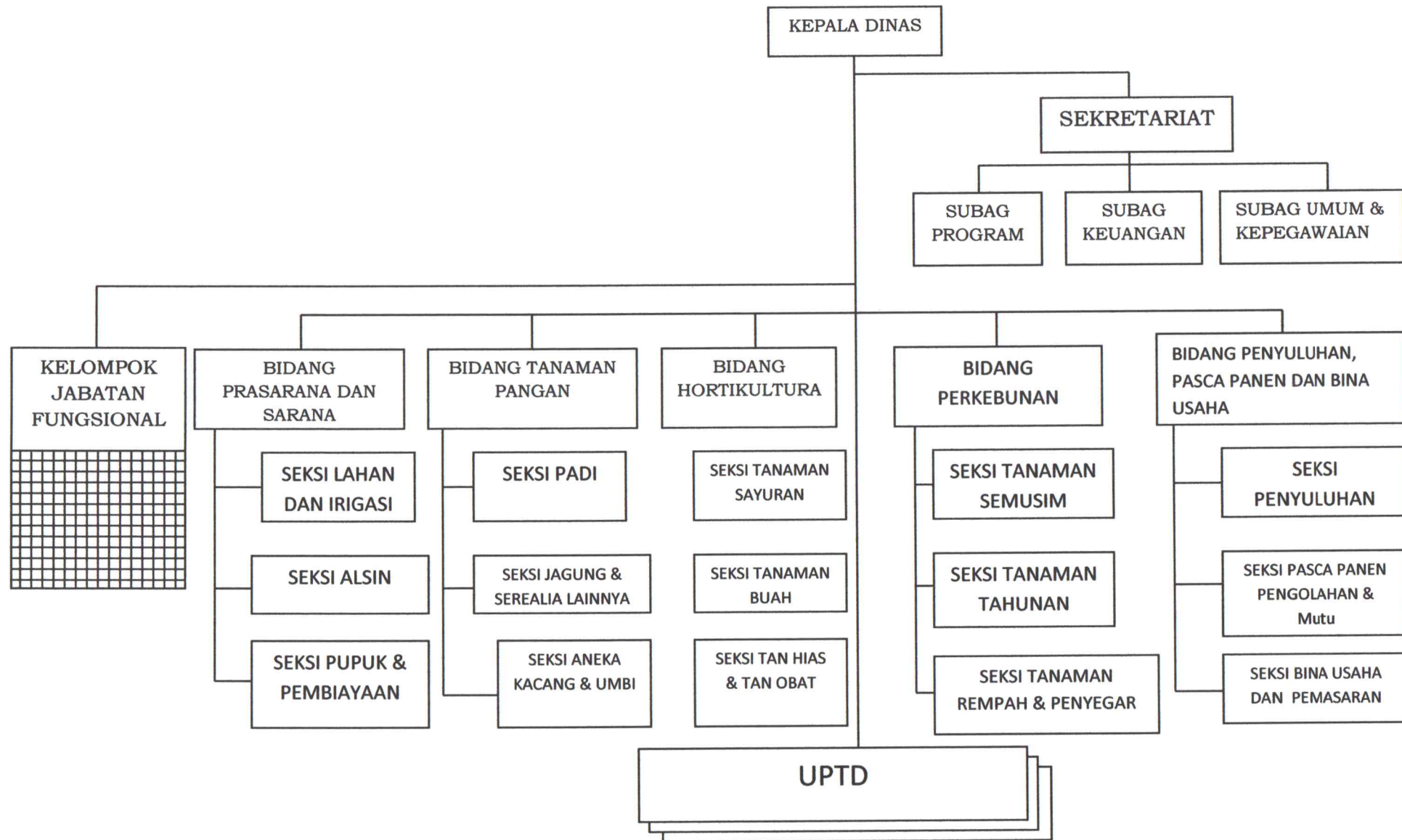
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah, antara lain: Melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 antara lain meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah



C. Aspek Strategis/Isu Strategis

Pada Tahun 2020 Dinas Pertanian dan Perkebunan fokus pada pencapaian sasaran utama, "Memantapkan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai Wujud Kontribusi Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah," yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut, meliputi:

1. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Pencegahan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan;
3. Optimalisasi kebun benih benih dan sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat;
4. Melaksanakan penambahan/rehabilitasi indfrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui modernisasi pertanian;
6. Meningkatkan pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran;
7. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
8. Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani;

Sedangkan kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran adalah:

1. Penerapan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani mendukung kegiatan asuransi bagi petani
3. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian dan perkebunan.
4. Penerapan Good Agriculture Practises (GAP) dalam rangka mendukung pengembangan pertanian organik.
5. Penyebaran benih bermutu bersertifikat melalui Balai Benih dan Optimalisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB)
6. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan.
7. Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran.
8. Menyiapkan dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan.
9. Menyiapkan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan, Tahun 2020

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Sasaran 3	Tahun 2020 4
1. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah	1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (ton): <ul style="list-style-type: none"> • Padi • Jagung • Kedelai 	9.703.932 3.675.002 65.942
		Peningkatan Produksi Hortikultura (ton): <ul style="list-style-type: none"> • Bawang merah • Cabe besar 	550.276 168.204
		Peningkatan Produksi Perkebunan (ton) Tebu Kelapa Kopi	2.860.511 169.132 21.019
	Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber	Jumlah peningkatan SDM Pertanian dan Perkebunan	3.510 org

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020
	Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan		
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai kepuasan masyarakat distanbun 2. Nilai SAKIP Distanbun	61,5 75,4

Sumber: Renstra Distanbun Prov Jateng 2018-2023

D. Sistematika Penulisan

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP Tahun 2020 terdiri 4 Bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

Bab IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Berdasarkan RPJMD Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, Renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah :

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman,

tanpa ada nya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketrucukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi nilai-nilai religius dalam

kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapus'*". Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya

manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam

bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga

menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. Tujuan

- a. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah.
- b. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

4. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
- b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	a. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi	a. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Padi Jagung Kedelai Bw. Merah Cabe Tebu Kopi Kelapa	11.543.015 3.660.360 102.726 528.537 200.836 2.934.025 20.482 164.248	9.703.932 3.675.002 65.942 550.276 168.204 2.860.511 21.019 169.132	9.752.452 3.689.702 67.591 572.016 171.568 2.869.093 21.556 169.639	9.801.214 3.704.460 69.281 593.756 175.000 2.877.700 22.093 170.148	9.850.220 3.719.278 71.013 615.495 178.500 2.886.333 22.629 170.659

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kedaulatan pangan di Jawa Tengah.							
		b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan	Jumlah peningkatan SDM Pertanian dan Perkebunan	3.450	3.510	3.570	3.600	3.690
2	a. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	a. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat Distanbun	60	61,5	63	63,5	64
		b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Distanbun	75	75,40	75,70	76	76,20

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan perjanjian kinerja Tahun 2020 dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Perjanjian berisikan tentang tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Gubernur melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tersebut disusun selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Lampiran perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tersaji pada tabel 3.

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tujuan 1			
	Memantapkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah	Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan perkebunan: Tanaman Pangan	1,10
Sasaran			
	Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan	Padi Jagung Kedelai Bawang merah Cabe Tebu Kopi Kelapa	11.629.588 3.675.002 104.940 550.276 209.232 2.948.695 21.019 165.069
Tujuan 2			
	Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah		
Sasaran			
	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan Masyarakat Distanbun	61,50
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Distanbun	75,40

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Agribisnis	Rp. 136.994.012.000,-	APBD
2. Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	Rp. 10.250.000.000,-	APBD
3. Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 43.654.907.000,-	APBD
4. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.350.000.000,-	APBD

5. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Rp. 17.189.250.000,-	APBN-DK
6. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Rp. 260.412.437.000,-	APBN-TP
7. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Rp. 22.593.448.000,-	APBN-DK
8. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Rp. 44.582.400.000,-	APBN-TP
9. Peningkatan Produksi komoditas perkebunan berkelanjutan	Rp. 2.057.370.000,-	APBN-DK
10. Peningkatan Produksi komoditas perkebunan berkelanjutan	Rp. 30.221.750.000,-	APBN-TP
11. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Rp. 2.886.490.000,-	APBN-DK
12. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Rp. 78.685.735.000,-	APBN-TP
13. Peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian	Rp. 59.281.550.000,-	APBN-DK

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insntansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Insntasi Pemerintah, setiap instnasi wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Proses pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada capaian pengukuran hasil Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati bersama. Pengukuran ini merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja utama (tabel 6) dan kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Pengukuran keberhasilan capaian sasaran strategis dan target organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan strategis, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2020 tanggung jawab, Dinas Pertanian dan Perkebunan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab nya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang harus diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2020 yaitu:

Sasaran Strategis :

- 1. Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan**
- 2. Peningkatan Kemampuan SDM Pertanian dan Perkebunan**
- 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah**
- 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Tolok ukur capaian sasaran strategis terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan terdiri dari 15 indikator terdiri dari :

1. Produksi Padi
2. Produksi Jagung
3. Produksi Kedelai
4. Produksi Bawang merah
5. Produksi cabe besar
6. Produksi Tebu
7. Produksi Kopi
8. Produksi Kelapa
9. Produksi kacang tanah
10. Produksi Kacang hijau
11. Produksi ubi kayu
12. Produksi Ubi jalar
13. Produksi Durian
14. Produksi Mangga
15. Produksi Salak

Tolok ukur capaian sasaran strategis terwujudnya peningkatan kemampuan SDM Pertanian dan Perkebunan terdiri dari 1 indikator dari:

1. Peningkatan SDM Pertanian dan Perkebunan

Tolok ukur capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah:

1. Nilai Kepuasan Distanbun

Tolok ukur capaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja perangkat daerah:

1. Nilai SAKIP Distanbun

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Keempat strategis dimaksud dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan

Tabel.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian dan Pertanian

No	Indikator Kinerja	Real 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Padi	9.655.654	9.703.932	9.471.567	97,60	9.850.220	96,15
2	Produksi Jagung	3.390.977	3.660.360	3.770.740	102,60	3.719.278	101,38
3	Produksi Kedelai	66.701	65.942	38.568	58,48	71.013	54,31
4	Produksi Bw.Merah	471.447	550.276	565.865	102,83	615.495	91,94
5	Produksi Cabe	163.873	168.204	155.412	92,39	178.500	87,06
6	Produksi Tebu	2.851.955	2.860.511	2.854.351	99,78	2.886.333	98,89
7	Produksi Kopi	22.831	21.019	24.065	114,49	22.629	106,34
8	Produksi Kelapa	168.593	169.132	168.804	99,80	170.659	98,91
9	Produksi Kacang tanah	77.510	96.389	95.679	99,26	102.376	93,45
10	Produksi Kacang hijau	99.495	106.187	125.060	117,77	117.233	106,67
11	Produksi Ubi kayu	2.436.733	3.471.751	2.556.459	72,92	73,63	65,67
12	Produksi Ubi jalar	144.811	172.929	147.857	85,50	196.175	75,37
13	Produksi Mangga	479.963	460.466	471.808	104,76	102,46	100,94
14	Produksi Durian	171.734	61.218	157.869	257,88	62.141	254,04
15	Produksi Salak	482.992	502.150	301.201	59,98	509.720	59,09

Prosentase Capaian Sasaran Strategis	104,40%		99,34%
--------------------------------------	---------	--	--------

Dari tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 1 tercapai sebesar 104,40% atau kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 99,34% dari target akhir Tahun Renstra 2023 tercapai target sebesar 100%. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam renstra 2018-2023.

Secara lebih rinci pencapaian sasaran dari indikator kinerja adalah sebagaimana dijelaskan dengan uraian berikut:

a. Capaian indikator Sasaran Produksi Padi

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian sd Th. 2020 Atas Target Renstra
		Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
1	Produksi Padi	9.703.932	9.471.567	97,60	50.650.833	18,70

Indikator Sasaran produksi padi target 9.703.932 ton tercapai 9.471.567 ton atau tercapai sebesar 97,60% dari target yang ditetapkan. Produksi padi tidak mencapai target dikarenakan ada nya mundur tanam. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu:

- 1) Indikator program persentase peningkatan produksi padi dengan target 0,5% dengan pencapaian target sebesar 0,54%. Upaya pencapaian target tersebut dengan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan. Target kinerja kegiatan seluas 29.670 ha dengan realisasi dan tercapai 29.670 ha atau tercapai 100%. Upaya yang lain yaitu dengan ada nya program kegiatan UPSUS Pajale (Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai) untuk mendukung swasembada pangan.

b. Capaian Indikator Sasaran Produksi Jagung

No	Indikator Kinerja	Real 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Jagung	3.390.977	3.675.002	3.770.740	102,60	3.719.278	101,38

Indikator Sasaran produksi jagung target 3.675.002 ton tercapai 3.770.740 ton atau tercapai sebesar 102,60% dari target yang ditetapkan. Untuk komoditas jagung melebihi target karena adanya program UPSUS Pajale (Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai) dalam rangka untuk mendukung swsasembada pangan. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu:

- 1). Indikator program persentase peningkatan produksi Jagung dan sereal lainya dengan target 0,3% dengan pencapaian target sebesar 0,3%. Upaya pencapaian target tersebut dengan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan. Target kinerja kegiatan seluas 12.987 ha dengan realisasi dan tercapai 12.703 ha atau tercapai 97,81%

c. Capaian Indikator Sasaran Kedelai

No	Indikator Kinerja	Real 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Kedelai	66.701	65.942	38.568	58,48	71.013	54,31

Indikator Sasaran produksi kedelai target 65.942 ton tercapai 38.568 ton atau tercapai sebesar 58,48% dari target yang ditetapkan. Walaupun ada Program UPSUS Pajale (Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai) tetapi produksi kedelai belum mencapai target dikarenakan adanya alih komoditas ke jagung dan petani kurang berminat dalam menanam kedelai karena harga yang rendah dan budidaya yang rumit. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu:

- 1). Indikator program persentase peningkatan produksi kedelai dengan target 2,1% dengan pencapaian target sebesar 1,20%. Upaya pencapaian target tersebut dengan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan. Target kinerja kegiatan seluas 2.500 ha dengan realisasi dan tercapai 1.467 ha atau tercapai 58,68%.

c. Capaian Indikator Sasaran Bawang Merah

No	Indikator Kinerja	Real 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Produksi Bw.Merah	471.447	550.276	565.865	102,83	615.495	91,94

Indikator Sasaran produksi bawang merah target 550.276 ton tercapai 565.865 ton atau tercapai sebesar 102,83% dari target yang ditetapkan. Produksi melebihi target dikarenakan adanya program UPSUS BABE (Upaya Khusus Bawang Merah dan Cabe). Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu:

- 1). Indikator program persentase peningkatan produksi bawang merah dengan target 3,80% dengan pencapaian target sebesar 4,44%. Upaya

pencapaian target tersebut dengan kegiatan peningkatan produksi tanaman hortikultura. Target kinerja kegiatan seluas 13 ha dengan realisasi dan tercapai 13 ha atau tercapai 100%.

d. Capaian Indikator Sasaran Cabe

No	Indikator Kinerja	Real 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Cabe	171.796	168.204	155.412	92,39	178.500	87,06

Indikator Sasaran produksi cabe target 168.204 ton tercapai 155.412 ton atau tercapai sebesar 92,39% dari target yang ditetapkan. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu:

- 1). Indikator program persentase peningkatan produksi cabe dengan target 2% dengan pencapaian target sebesar 2,37%. Upaya pencapaian target tersebut dengan kegiatan peningkatan produksi tanaman hortikultura. Target kinerja kegiatan seluas 24 ha dengan realisasi dan tercapai 24 ha atau tercapai 100%.

d. Capaian Indikator Sasaran Tebu

No	Indikator Kinerja	Real 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Tebu	2.851.955	2.860.511	2.854.351	99,78	2.886.333	98,89

Indikator Sasaran produksi tebu target 2.860.511 ton tercapai 2.854.351 ton atau tercapai sebesar 99,78% dari target yang ditetapkan. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu:

- 1). Indikator program persentase peningkatan produksi tebu dengan target 0,3% dengan pencapaian target sebesar 0,3%. Kegiatan untuk mendukung sasaran tersebut dialihkan untuk Jaring Pengaman Ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid 19.

e. Capaian Indikator Sasaran Kopi

No	Indikator Kinerja	Real 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Kopi	22.831	21.019	24.065	114,49	22.629	106,34

Indikator Sasaran produksi kopi target 21.019 ton tercapai 24.065 ton atau tercapai sebesar 114,49% dari target yang ditetapkan. Untuk komoditas kopi melebihi target dikarenakan minat petani menanam kopi tinggi dan minat masyarakat mengkonsumsi kopi juga tinggi dan iklim yang mendukung untuk pertumbuhan buah kopi. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu:

- 1). Indikator program persentase peningkatan produksi kopi dengan target 2,5% dengan pencapaian target sebesar 2,51%. Kegiatan untuk mendukung sasaran tersebut dialihkan untuk Jaring Pengaman Ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid 19.

f. Capaian Indikator Sasaran Kelapa

No	Indikator Kinerja	Real 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Kelapa	168.593	169.132	168.804	99,80	170.659	98,91

Indikator Sasaran produksi kelapa target 169.132 ton tercapai 168.804 ton atau tercapai sebesar 99,80% dari target yang ditetapkan. Produksi kelapa belum mencapai target dikarenakan Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu

- 1). Indikator program persentase peningkatan produksi kelapa dengan target 0,3% dengan pencapaian target sebesar 0,3%. Kegiatan untuk mendukung sasaran tersebut dialihkan untuk Jaring Pengaman Ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid 19.

2. Sasaran Peningkatan Kemampuan SDM Pertanian dan Perkebunan

Tabel 3.2

No	Indikator Kinerja	Real 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Peningkatan SDM Pertanian dan Perkebunan	4.680	3.510	520	14,81	3.690	14,09
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					14,81		14,09

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 2 tercapai sebesar 14,81 atau kategori kurang. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 14,81% dari target akhir Tahun Renstra 2023 tercapai target sebesar 14,09%. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam renstra 2018-2023.

Indikator sasaran jumlah peningkatan SDM Pertanian dan Perkebunan target 3.510 orang tercapai 520 orang atau tercapai 14,81% dari target yang ditetapkan hal dikarenakan adanya kegiatan yang dikurangi untuk Jaring Pengaman Ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid 19

3. Sasaran Meningkatkannya kualitas pelayanan perangkat daerah

Tabel 3.3

No	Indikator Kinerja	Real 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Kepuasan Masyarakat Distanbun	81,50	61,50	82,75	134,5	64	129,29
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					135,5%		129,29%

Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 3 tercapai sebesar 135,5% atau kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 129,29% dari target akhir Tahun Renstra 2023 tercapai target sebesar 100%. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam renstra 2018-2023.

Indikator sasaran nilai kepuasan masyarakat distanbun target 61,50 tercapai 82,75 atau tercapai 135,5% dari target yang ditetapkan. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2018-2023 dan belum menjadi indikator dalam Renstra lama sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Indikator program persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah dengan target 100% dengan pencapaian target sebesar 100%.

4. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel. 3.4

No	Indikator Kinerja	Real 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai SAKIP Distanbun	75	75,40	77	102,12	76,20	101,04
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					102,12%		101,04

Dari tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 4 tercapai sebesar 102,12% atau kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 101,04% dari target akhir Tahun Renstra 2023 tercapai target sebesar 100%. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam renstra 2018-2023.

Indikator sasaran nilai kepuasan masyarakat distanbun target 75,40 tercapai 77 atau tercapai 102,12% dari target yang ditetapkan. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2018-2023.

Indikator program persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah dengan target 100% dengan pencapaian target sebesar 100%.

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan, pada Tahun Anggaran 2020, di dukung oleh Anggaran APBD : Belanja Langsung sebesar Rp 142.559.469.000 dan Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp. 102.383.834.000 jadi total anggaran secara keseluruhan Rp. 244.943.303.000.

Anggaran APBD terserap 86,10 % atau senilai Rp 122.737.155.545. Tidak terserap 13,9 % atau senilai 19.822.313.455. Sedangkan fisik kegiatan terserap 100%.

Tabel 3.5. Penggunaan anggaran APBD Tahun 2020

Belanja Langsung			
Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	22.771.864.000	17.897.717.0118	78,6
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	860.981.000	573.438.409	66,6
Pengembangan Agribisnis	112.806.290.000	98.173.073.473	87,03
Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	6.120.334.000	6.092.926.652	99,55
Jumlah	142.559.469.000	122.737.155.545	86,1
Belanja Tidak Langsung			
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Gaji/tunjangan	102.383.834.000	97.793.741.299	95,52

Tabel 3.6. Penggunaan Anggaran APBN Tahun 2020

Program	Dekonsentrasi		
	Anggaran (Rp)	Serapan	% Serapan
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	14.422.493.000	14.011.709.262	97,15
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	11.992.592.000	11.587.867.487	96,63
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian	2.796.490.000	2.547.413.586	91,09
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu tanaman	1.432.748.000	1.308.637.629	91,34

perkebunan berkelanjutan			
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	49.441.895.000	48.878.483.356	98,86
Jumlah	80.086.218.000	78.334.111.320	97,81
Program	Tugas Pembantuan		
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	152.466.682.000	146.587.589.061	96,14
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	8.222.842.000	7.256.206.042	88,24
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan	15.915.679.000	13.139.158.616	82,55
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian	48.307.825.000	46.043.328.114	95,31
Jumlah	224.913.128.000	213.026.281.833	94,71
Total Anggaran (DK+TP)		304.999.346.000	
Total Serapan (DK+TP)		291.360.393.153	
% Serapan APBN			95,53

Anggaran APBN sebesar Rp **304.999.346.000** (Dekonsentrasi sebesar Rp **80.086.218.000** dan Tugas Pembantuan sebesar Rp **224.913.128.000**). Serapan anggaran APBN 95,53% (Rp 291.360.393.153), dengan serapan Anggaran Dekonsentrasi terserap 97,81% (Rp 78.334.111.320) dan Anggaran Tugas Pembantuan terserap 94,71% (Rp 213.026.281.833).

c.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2020 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 8.851.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.327.875.975 (150,58 %).

Tabel 3.7. Perkembangan target dan realisasi pendapatan Th 2019-2020

Uraian	Th 2019	Th 2020	+/-	%
Target	13.300.000.000	8.851.000.000	-4.449.000.000	-50,26
Realisasi	13.306.462.681	13.327.875.975	21.413.294	0,16
% Capaian	100,05	150,58		

C. Analisis efisiensi sumberdaya

Sumberdaya yang mendukung pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan meliputi kondisi iklim, sumberdaya lahan, sumberdaya manusia, dan sarana prasarana.

1. Kondisi iklim yang mendukung budidaya pertanian dan perkebunan

Produk pertanian dan perkebunan merupakan produk yang sangat bergantung pada kondisi iklim. Faktor iklim berpengaruh pada pola tatanan agroekosistem. Kondisi seperti ini bisa diprediksi dan telah dipersiapkan, namun tidak dapat dipastikan keakuratannya.

Pada Tahun 2020 terjadi musim kemarau basah yang menunjang pada pertumbuhan vegetatif tetapi mengganggu pertumbuhan generatif sehingga produksi pertanian dan perkebunan terutama tanaman hortikultura mengalami rendah di produktivitas nya. Sedangkan untuk tanaman pangan mengalami mundur tanam.

2. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi di Jawa Tengah mempengaruhi tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat tinggal dan fasilitas lainnya akan semakin terus bertambah. Permasalahan alih fungsi lahan diharapkan lebih terkendali dengan penerapan Perda RT RW maupun Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan, bukan hanya masalah penegakan hukum yang harus diperhatikan terkait masalah ini, namun bagaimana mengupayakan lahan-lahan yang ada dapat memberikan

pendapatan yang lebih menjanjikan ketika dimanfaatkan untuk budidaya pertanian. Apabila kondisi demikian tetap dibiarkan bukan tidak mungkin pertanian hanya akan menjadi masa lalu petani kita.

3. Sumber daya manusia

Permasalahan dalam pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah di antaranya yaitu terdapat perubahan sosial budaya masyarakat di pedesaan dari masyarakat budidaya pertanian menjadi masyarakat budidaya industri. Hal ini terlihat dari penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian diikuti dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja disektor non pertanian terutama sektor industri maupun jasa. Survey BPS 2013 penurunan tingkat tenaga kerja sebesar 25,05% dari sektor pertanian dipicu oleh beberapa alasan. Selain lahan pertanian yang semakin sempit juga karena tingkat pendidikan masyarakat semakin meningkat. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang maka cenderung untuk memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya tersebut.

4. Sarana Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana pertanian di Jawa Tengah belum memadai. Jaringan irigasi dan pengairan masih banyak kerusakan. Selain itu sarana pendukung pertanian juga kurang, seperti alat, mesin pra dan pasca panen. Melalui Program Upsus Pajale, Upsus babe, perbaikan jaringan irigasi dan fasilitasi bantuan alat-alat dan mesin pertanian telah terlaksana dengan baik.

D. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian dan perkebunan, mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

pembinaan dan fasilitasi bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan lingkup provinsi dan kabupaten/kota; pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan usaha pertanian; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan pengelolaan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Berbagai program dan kegiatan yang teralokasi melalui pendanaan APBD dan APBN terukur melalui indikator kinerja utama. Keberhasilan tersebut terwujud dalam peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkelanjutan. Perwujudan ini didukung oleh berbagai upaya seperti efisiensi tenaga kerja manusia, peningkatan indeks penanaman, peningkatan produktivitas, pengamanan produksi dari gangguan OPT, perbaikan penanganan panen dan pasca panen, dan peningkatan nilai jual melalui orientasi kualitas dan pasar.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan skala pengukuran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis, nilai kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan secara umum sangat baik dalam "Memantapkan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan Utama sebagai Wujud Kontribusi Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah." Artinya Dinas Pertanian dan Perkebunan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi dari stakeholder secara keseluruhan untuk melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan yang akuntabel dan transparan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program/kegiatan dengan rata-rata capaian keseluruhan indikator sebesar 104,40%. Adapun capaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 Tercapainya produksi pertanian dan perkebunan, nilai tukar petani dicapai 103,25%.
2. Sasaran 2 tidak tercapainya persentase kemampuan peningkatan SDM Pertanian dan Perkebunan karena adanya pengalihan kegiatan untuk penanggulangan dampak pandemi covid 19 sehingga pelatihan-pelatihan dikurangi.
3. Sasaran 3 Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian dan Perkebunan dicapai 135,5%
4. Sasaran 4 Nilai Sakip Dinas Pertanian dan Perkebunan dicapai 102,12%

Peningkatan ketangguhan sektor pertanian Jawa Tengah sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak terjadinya pandemi covid 19. Hal ini dilakukan melalui kebijakan sektor pertanian yang fokus pada upaya pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi covid 19d melalui

kegiatan Jaring Pengaman Ekonomi. Upaya tersebut adalah dengan bantuan benih padi seluas 26.545 ha, benih jagung seluas 3.737 ha, benih jahe 20 ha dan bawang putih 100 ha.

B. Saran

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, senantiasa mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah

Guna mewujudkan visi tersebut maka Dinas Pertanian dan Perkebunan sebaiknya perlu melakukan perbaikan dalam hal:

1. Sistem peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berkelanjutan, peningkatan efisiensi dalam usaha pertanian, dan sistem peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Sistem pengendalian internal dengan pemetaan resiko masing-masing kegiatan di semua bidang lingkup Dinas, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan tepat sasaran dan berdampak pada pencapaian *out come* kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan baik.

**Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah**



**Ir. Suryo Banendro,MP
NIP. 19610408-198903 1 006**